



Magnet Pariwisata dan Cagar Budaya untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sinergi Pemangku Kepentingan Kelola Malioboro yang Inklusif

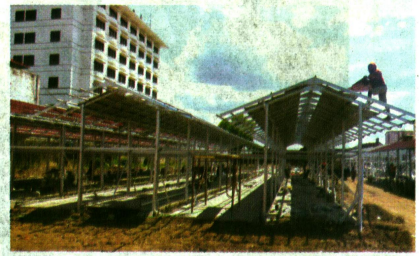
BAKAL DIRELOKASI: Sejumlah dagangan milik PKL Malioboro yang berjualan di sisi barat. Rencananya pada awal tahun depan, Pemda DIY bakal merelokasi seluruh PKL ke eks Bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata DIY.



MALIOBORO sebagai destinasi wisata dan kawasan perekonomian punya sejumlah kemiripan dengan King's Cross London, Inggris dan Valiasr & Bazar Teheran, Iran. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Hangga Fathana punya catatannya.

Dia mengadakan studi komparasi atas ketiga destinasi di negara yang berbeda tersebut. "Tinjauan komparasi itu untuk membaca masa depan Malioboro," ujar Hangga dalam sebuah diskusi terbatas belum lama ini.

Baik King's Cross London, Valiasr & Bazar Teheran dan Malioboro memiliki pola sinergi pemangku kepentingan. Pola hubungan itu di King's Cross memelihara keseimbangan yang berkelanjutan. Sedangkan Valiasr & Bazar pola hubungannya menjauhkan relasi kuasa yang oposisional. Lainnya dengan Malioboro ■



TERUS DIKEBUT: Bekas kantor Dinas Pariwisata DIY menjadi salah satu tempat relokasi PKL Malioboro. Pengerjaan harus tuntas sebelum akhir Desember ini.

Sinergi Pemangku Kepentingan Kelola Malioboro yang Inklusif

Sambungan dari hal 1

"Polanya mengutamakan titik moderasi agar tercipta keseimbangan ekosistem," ujar Hangga.

Di ketiga kawasan itu juga terjadi pola interaksi politik. Memanfaatkan kehadiran migran sebagai momentum untuk agenda inklusi sosial. Itulah yang terjadi di King's Cross London. Adapun di Valiasr & Bazar yang terjadi adalah kontestasi mengenai ruang publik, peran ideologi gender dalam politik negosiasi. Sedangkan Malioboro polanya keseimbangan antara mengamankan amanah konstitusi dan keseimbangan hak serta hak asasi.

Pola negosiasi juga mengemuka. King's Cross menghindari penyidikan publik, membangun kolaborasi, memasukkan unsur pelestarian cagar budaya. Sedangkan Valiasr & Bazar pendekatan kontestasi, pendekatan kolaborasi dan kompetisi. Kedua pola itu tidak ditemukan di Malioboro. "Seluruh aktor terlibat. Tidak hanya pelaku kepentingan Malioboro. Namun

seluruh pemangku kepentingan di Kota Jogja dan DIY," urainya.

Dikatakan, Malioboro sebagai kawasan cagar budaya utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Karena itu, membaca kawasan Malioboro harus dengan kaca mata jembatan ekonomi masyarakat. Malioboro juga harus ditempatkan sebagai magnet pariwisata Kota Jogja dan DIY. "Ujung dari kesejahteraan rakyat yang harus dikawal adalah bagaimana fungsi ekonomi dalam cagar budaya tercipta dan diterjemahkan secara operasional," jelasnya.

Ke depan pengelolaan Malioboro membutuhkan pendekatan yang mengutamakan titik moderasi agar terjadi keseimbangan ekosistem kawasan. Satu sisi mengarah pada peraturan yang berlaku. Sisi lain mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi pelaku agar tercipta situasi yang kondusif.

"Pendekatan moderasi dilakukan dengan cara menghormati proses pendekatan inklusif," terang Hangga. Proses ini tidak

hanya dibicarakan pelaku kepentingan Malioboro. Tapi semua pemangku kepentingan di Kota Jogja dan di DIY.

Dari analisa politik dalam perspektif ekonomi politik ada tiga hal yang berpengaruh di Malioboro. Nilai yakni persaingan atau kerja sama. Kepentingan meliputi siapa yang diuntungkan atau yang dirugikan. Ketiga, kekuasaan. Siapa yang berkuasa. Apa sumber kekuasaannya. Nilai dan kepentingan apa yang didukung oleh kekuasaan tersebut. Hangga juga menyebutkan terjadinya kepentingan klasik. Yakni mengutamakan efisiensi demi percepatan atau pertumbuhan ekonomi atau pemerataan demi perubahan tata sosial ekonomi sehingga aktor lemah dapat memperbaiki nasibnya.

Soal alternatif kebijakan yang dipilih, Hangga menegaskan tergantung pada variabel politik. "Nilai, kepentingan atau kekuasaan," katanya. Ditambahkan, proses politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kekayaan (ekonomi) dan kekuasaan (politik).

Untuk memahami peran negara, Hangga melihat dari relasi pasar dan negara serta daya paksa negara. Hangga kembali mencontohkan pedagang kaki lima (PKL) di Teheran, Iran. Pendekatan yang dipakai kontestasi dengan mengerahkan penjaga pada zona larangan PKL.

Pendekatan itu memunculkan tekanan yang konstan. Pendekatan kolaborasi antara PKL dengan pemilik toko dengan mendesain negosiasi langsung antara kedua pihak. Sedangkan pendekatan kompetisi dengan memunculkan narasi kompetisi antara pedagang lokal dan migran dan antar gender.

Sedangkan pola interaksi politik PKL di Teheran kontestasi terhadap ruang publik melibatkan banyak pihak. Tidak hanya negara dan vendors. Tapi juga para pemangku kepentingan yang heterogen. "Ada peran ideologi gender yang mempengaruhi politik negosiasi. PKL perempuan cenderung lebih diprioritaskan terakhir dalam konteks relokasi," katanya. (kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005